

**LAPORAN KEUANGAN UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA
ANGGARAN BA.018
SEMESTER II TAHUN ANGGARAN 2018**

Sekretariat Badan Karantina Pertanian
Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2018



Jl. Harsono RM No.3 Ragunan Pasar Minggu Jakarta 12550 Gedung E Lt.1,3,5 & 7
Telepon/faximili (021)7816484,7816483,7816482,7816481

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Sekretariat Badan Karantina Pertanian adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Pertanian yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Sekretariat Badan Karantina Pertanian mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang lebih transparan, akurat, dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Sekretariat Badan Karantina Pertanian. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Jakarta, Januari 2019
Kuasa Pengguna Anggaran,

Banun Harpini
NIP. 19601019 198503 2 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	1
Daftar Isi.....	2
Pernyataan Telah Direviu.....	4
Pernyataan Tanggung Jawab.....	5
Ringkasan.....	6
I Laporan Realisasi Anggaran.....	8
II Neraca.....	9
III Laporan Operasional.....	10
IV Laporan Perubahan Ekuitas.....	11
V Catatan atas Laporan Keuangan.....	12
A Penjelasan Umum.....	12
B Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran.....	20
B.1 Penerimaan Negara Bukan Pajak.....	21
B.2 Belanja Pegawai.....	22
B.3 Belanja Barang.....	22
B.4 Belanja Modal.....	23
B.4.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin.....	24
C Penjelasan atas Pos-pos Neraca.....	25
C.1 Aset Lancar.....	25
C.1.1 Kas Di Bendahara Pengeluaran.....	25
C.1.2 Persediaan.....	25
C.1.2 Persediaan Belum Diregister.....	25
C.2 Aset Tetap.....	26
C.2.1 Tanah.....	26
C.2.2 Peralatan dan Mesin.....	27
C.2.3 Gedung dan Bangunan.....	30
C.2.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan.....	30
C.2.5 Aset Tetap Lainnya.....	31
C.2.6 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap.....	31
C.3 Aset Lainnya.....	32
C.3.1 Aset Tak Berwujud.....	32
C.3.2 Aset Lain-lain.....	32

C.3.3	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya.....	34
C.4	Kewajiban Jangka Pendek.....	35
C.4.1	Uang Muka dari KPPN.....	35
C.5	Ekuitas.....	35
C.5.1	Ekuitas.....	35
D	Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional.....	36
D.1	Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya.....	36
D.2	Beban Pegawai.....	36
D.3	Beban Persediaan.....	37
D.4	Beban Barang dan Jasa.....	38
D.5	Beban Pemeliharaan.....	38
D.6	Beban Perjalanan Dinas.....	39
D.7	Beban Penyusutan dan Amortisasi.....	40
D.8	Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional.....	40
E	Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas.....	42
E.1	Ekuitas Awal.....	42
E.2	Surplus/Defisit-LO.....	42
E.3	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar.....	42
E.4	Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas.....	42
E.4.1	Koreksi Lain-lain.....	42
E.4.2	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi.....	42
E.4.3	Penyesuaian Nilai Aset.....	43
E.4.4	Selisih Revaluasi Aset Tetap.....	43
E.5	Transaksi Antar Entitas.....	43
E.5.1	Diterima Dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan Ke Entitas Lain (DKEL).....	44
E.5.2	Transfer Masuk/Transfer Keluar.....	44
E.6	Ekuitas Akhir.....	44
F	Pengungkapan-pengungkapan Lainnya.....	45
F.1	Kejadian-kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca.....	45
F.2	Pengungkapan Lain-lain.....	45

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Sekretariat Badan Karantina Pertanian yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Semester II Tahun Anggaran 2018 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, Januari 2019
Kuasa Pengguna Anggaran,

Banun Harpini
NIP. 19601019 198503 2 001

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Sekretariat Badan Karantina Pertanian Semester II Tahun 2018 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

I Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2018.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2018 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp382.972.885,00 atau mencapai 765,95% dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp50.000.000,00

Realisasi Belanja Negara pada TA 2018 adalah sebesar Rp87.804.837.126,00 atau mencapai 99,55% dari alokasi anggaran sebesar Rp88.204.133.000,00

II Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2018.

Nilai Aset per 31 Desember 2018 dicatat dan disajikan sebesar Rp32.954.108.203,00 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp370.991.600,00; Aset Tetap (neto) sebesar Rp31.858.449.868,00; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp0,00; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp724.666.735,00.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp32.954.108.203,00.

III Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp19.403.292,00, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp88.929.092.318,00 sehingga terdapat Defisit Kegiatan Operasional senilai Rp-88.909.689.026,00. Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Surplus Rp116.789.655,00 dan Defisit Rp0,00 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp-88.792.899.371,00.

IV Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2018 adalah sebesar Rp17.905.466.581,00 ditambah Defisit-LO sebesar Rp-88.792.899.371,00 kemudian ditambah/dikurangi dengan koreksi-koreksi senilai Rp17.499.764.912,00 dan

ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp86.341.776.081,00 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2018 adalah senilai Rp32.954.108.203,00.

V Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2018 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

**SEKRETARIAT BADAN KARANTINA PERTANIAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERKAHIR 31 DESEMBER 2018 dan 31 DESEMBER 2017**

Uraian	Catatan	31 Desember 2018			31 Desember 2017
		Anggaran	Realisasi	%.	Realisasi
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	50.000.000,00	382.972.885,00	765,95	260.669.853,00
Jumlah Pendapatan		50.000.000,00	382.972.885,00	765,95	260.669.853,00
BELANJA					
Belanja Pegawai	B.2	15.407.065.000,00	15.353.293.653,00	99,65	14.933.151.001,00
Belanja Barang	B.3	71.745.197.000,00	71.402.630.246,00	99,52	78.434.293.015,00
Belanja Modal	B.4	1.051.871.000,00	1.048.913.227,00	99,72	3.153.580.922,00
Jumlah Belanja		88.204.133.000,00	87.804.837.126,00	99,55	96.521.024.938,00

II. NERACA

SEKRETARIAT BADAN KARANTINA PERTANIAN
NERACA
PER 31 DESEMBER 2018 dan 31 DESEMBER 2017

Uraian	Catatan	31 Desember 2018	31 Desember 2017
ASET			
Aset Lancar			
Persediaan	C.1.1	370.991.600,00	1.172.938.650,00
Jumlah Aset Lancar		370.991.600,00	1.172.938.650,00
Aset Tetap			
Tanah	C.2.1	22.501.134.000,00	4.789.870.000,00
Peralatan dan Mesin	C.2.2	29.604.102.419,00	30.026.112.819,00
Gedung dan Bangunan	C.2.3	1.595.945.000,00	1.595.945.000,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.2.4	90.833.719,00	90.833.719,00
Aset Tetap Lainnya	C.2.5	69.674.935,00	220.278.035,00
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	C.2.6	-21.845.992.322,00	-20.556.403.288,00
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	C.2.6	-60.322.833,00	-20.107.611,00
Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.2.6	-27.250.115,00	-24.979.271,00
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	C.2.6	-69.674.935,00	-129.978.035,00
Jumlah Aset Tetap		31.858.449.868,00	15.991.571.368,00
Aset Lainnya			
Aset Tak Berwujud	C.3.1	1.117.146.000,00	1.117.146.000,00
Aset Lain-lain	C.3.2	280.495.000,00	914.575.000,00
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	C.3.3	-258.934.285,00	-91.325.000,00
Akumulasi Amortisasi Aset Lainnya	C.3.4	-414.039.980,00	-1.064.939.437,00
Jumlah Aset Lainnya		724.666.735,00	740.956.563,00
Jumlah Aset		32.954.108.203,00	17.905.466.581,00
Kewajiban Jangka Pendek			
Uang Muka dari KPPN	C.4.1	0,00	0,00
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		0,00	0,00
Jumlah Kewajiban		0,00	0,00
Ekuitas			
Ekuitas	C.5.1	32.954.108.203,00	17.905.466.581,00
Jumlah Ekuitas		32.954.108.203,00	17.905.466.581,00
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas		32.954.108.203,00	17.905.466.581,00

III. LAPORAN OPERASIONAL

SEKRETARIAT BADAN KARANTINA PERTANIAN LAPORAN OPERASIONAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018 dan 31 DESEMBER 2017

Uraian	Catatan	31 Desember 2018	31 Desember 2017
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.1	19.403.292,00	22.938.822,00
JUMLAH PENDAPATAN		19.403.292,00	22.938.822,00
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	15.353.293.653,00	14.933.151.001,00
Beban Persediaan	D.3	731.973.100,00	732.574.600,00
Beban Barang dan Jasa	D.4	15.887.549.854,00	22.205.905.463,00
Beban Pemeliharaan	D.5	3.352.922.036,00	3.403.014.547,00
Beban Perjalanan Dinas	D.6	50.131.774.606,00	50.132.198.405,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.7	3.471.579.069,00	3.743.455.421,00
JUMLAH BEBAN		88.929.092.318,00	95.150.299.437,00
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL		-88.909.689.026,00	-95.127.360.615,00
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	D.8	59.850.000,00	178.850.988,00
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	D.8	79.430.577,00	300.481.214,00
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.8	361.887.553,00	143.887.043,00
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.8	226.517.321,00	286.879.032,00
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		116.789.655,00	-264.622.215,00
SURPLUS/DEFISIT - LO		-88.792.899.371,00	-95.391.982.830,00

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

**SEKRETARIAT BADAN KARANTINA PERTANIAN
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018 dan 31 DESEMBER 2017**

Uraian	Catatan	31 Desember 2018	31 Desember 2017
EKUITAS AWAL	E.1	17.905.466.581,00	17.680.479.358,00
SURPLUS/DEFISIT-LO	E.2	-88.792.899.371,00	-95.391.982.830,00
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	E.3	0,00	0,00
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.4		
Koreksi Lain-lain	E.4.1	0,00	-7.039.308,00
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	E.4.2	-211.499.088,00	0,00
Penyesuaian Nilai Aset	E.4.3	0,00	0,00
Selisih Revaluasi Aset Tetap	E.4.4	17.711.264.000,00	-863.119.199,00
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.5	86.341.776.081,00	96.487.128.560,00
EKUITAS AKHIR		32.954.108.203,00	17.905.466.581,00

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Sekretariat Badan Karantina Pertanian

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Badan Karantina Pertanian dibantu oleh unsur-unsur :

1. Sekretariat Badan Karantina Pertanian
2. Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani
3. Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati
4. Pusat Kepatuhan Kerjasama dan Informasi Perkarantinaan
5. 52 Unit Pelaksana Teknis (UPT) Karantina Pertanian

Satker Sekretariat Badan Karantina Pertanian di dalamnya terdiri dari Sekretariat Badan Karantina Pertanian, Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani, Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati dan Pusat Kepatuhan Kerjasama dan Informasi Perkarantinaan.

Sekretariat Badan Karantina Pertanian berkomitmen dengan visi **“Kesekretariatan Badan Karantina Pertanian yang profesional dan amanah.”**

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No 24/Permentan/OT.040/5/2016 tanggal 20 Mei 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian menyatakan bahwa tugas pokok Sekretariat Badan Karantina Pertanian adalah memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan Karantina Pertanian.

Dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas pokok tersebut diatas, Sekretariat Badan Karantina Pertanian menyelenggarakan fungsi :

1. Koordinasi, beserta penyusunan rencana dan program di bidang perkarantinaan hewan dan tumbuhan, serta pengawasan keamanan hayati; dan program kerja terkait/pendukung lainnya
2. Pengelolaan urusan keuangan dan perlengkapan;
3. Evaluasi dan penyempurnaan organisasi dan tata laksana, serta pengelolaan urusan kepegawaian;
4. Penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik; dan
5. Pelaksanaan urusan tata usaha Badan Karantina Pertanian.

Pusat karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati yaitu “ Mendukung Badan Karantina Pertanian menjadi Instansi yang Tangguh dan Terpercaya dalam Perlindungan Kelestarian Sumberdaya Alam Hayati, Keanekaragaman Hayati serta Keamanan Pangan dan Lingkungan”

Peraturan Menteri Pertanian No 24/Permentan/OT.040/5/2016 tanggal 20 Mei 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian menyatakan bahwa tugas dan fungsi Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati adalah melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan, evaluasi di bidang perkarantinaan tumbuhan benih, tumbuhan non benih dan pengawasan pangan segar asal tumbuhan, jenis asing invasif, agens hayati, produk rekayasa genetik, benda lain dan media pembawa lain impor, ekspor dan antar area.

Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani berkomitmen dengan visi “Menjadi Pusat Teknis yang Tangguh dan Terpercaya dalam Perlindungan Kelestarian Sumberdaya Alam Hayati Hewani”

Peraturan Menteri Pertanian No.24/Permentan/OT.040/5/2016 tanggal 20 Mei 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, menyatakan bahwa tugas pokok Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani adalah melaksanakan penyusunan kebijakan teknis perkarantinaaan hewan dan pengawasan keamanan hayati hewani.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut diatas, Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan, serta evaluasi di bidang perkarantinaaan hewan hidup;
2. Penyusunan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan, serta evaluasi di bidang perkarantinaaan produk hewan; dan
3. Penyusunan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan, serta evaluasi di bidang pengawasan invasive alien species, agensia hayati, produk rekayasa genetika, benda lain dan media pembawa lain impor, ekspor serta antar area.

Pusat Kepatuhan, Kerjasama dan Informasi Perkarantinaaan berkomitmen dengan visi “Mendukung Badan Karantina Pertanian Menjadi Instansi yang tangguh dan Terpercaya’ dalam Perlindungan Kelestarian Sumberdaya alam hayati Hewan dan Tumbuhan, Lingkungan dan Keanekaragaman Hayati serta Keamanan Pangan”

Peraturan Menteri Pertanian No. 24/Permentan/OT.040/5/2016 tanggal 20 Mei 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, menyatakan bahwa tugas pokok Pusat Kepatuhan, Kerjasama dan Informasi Perkarantinaaan dalam mendukung Badan Karantina Pertanian adalah melaksanakan penyusunan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan penindakan, dan pelaksanaan kerjasama , serta pengelolaan informasi perkarantinaaan.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut diatas, Pusat kepatuhan, Kerjasama dan Informasi Perkarantinaaan menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi di bidang pengawasan dan penindakan perkarantinaaan.
2. Pelaksanaan kerjasama perkarantinaaan,

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Semester II Tahun 2018 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Sekretariat Badan Karantina Pertanian. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemendan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari

Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.3. Basis Akuntansi

Sekretariat Badan Karantina Pertanian menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasi dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran basis kas untuk disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Sekretariat Badan Karantina Pertanian dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Semester II Tahun 2018 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Sekretariat Badan Karantina Pertanian yang merupakan entitas pelaporan dari Kementerian Pertanian. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Sekretariat Badan Karantina Pertanian adalah sebagai berikut:

(1) Pendapatan - LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2) Pendapatan - LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/ Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;

- harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (Satu Juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (Dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Pemerintah melakukan penilaian kembali (revaluasi) berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara. Revaluasi dilakukan terhadap aset tetap berupa Tanah, Gedung dan Bangunan, serta Jalan, Jaringan, dan Irigasi berupa Jalan Jembatan dan Bangunan Air pada Kementerian Negara/Lembaga sesuai kodifikasi Barang Milik Negara yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015. Termasuk dalam ruang lingkup objek revaluasi adalah aset tetap pada Kementerian/Lembaga yang sedang dilaksanakan Pemanfaatan. Pelaksanaan penilaian dalam rangka revaluasi dilakukan dengan pendekatan data pasar, pendekatan biaya, dan/atau pendekatan pendapatan oleh Penilai Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan. Revaluasi dilakukan pada tahun 2017 dan 2018. Berdasarkan pertimbangan efisiensi anggaran dan waktu penyelesaian, pelaksanaan penilaian dilakukan dengan survei lapangan untuk objek penilaian berupa Tanah dan tanpa survei lapangan untuk objek penilaian selain Tanah.
- Nilai aset tetap hasil penilaian kembali menjadi nilai perolehan baru dan nilai akumulasi penyusutannya adalah nol. Dalam hal nilai aset tetap hasil revaluasi lebih tinggi dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai penambah ekuitas pada Laporan Keuangan. Namun, apabila nilai aset tetap hasil revaluasi lebih rendah dari nilai

buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai pengurang ekuitas pada Laporan Keuangan.

- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus , ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD .

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat sebagaimana diubah dengan PMK 90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d 20 Tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d 50 Tahun
Jalan, Irigasi dan Jaringan	5 s.d 40 Tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat musik modern)	4 Tahun

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan / dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan .
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan .

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap , dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan , aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat netto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi .
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)
Software Komputer	04
Franchise	05
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Ekonomi atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Sekretariat Badan Karantina Pertanian telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya program penghematan belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut:

Uraian	Anggaran Awal	Anggaran Setelah Revisi
Pendapatan		
Pendapatan dari Pengelolaan BMN (Pemanfaatan dan Pemindahtanganan) serta Pendapatan dari Penjualan	50.000.000,00	50.000.000,00
Jumlah Pendapatan	50.000.000,00	50.000.000,00
Belanja		
Belanja Pegawai	15.407.065.000,00	15.407.065.000,00
Belanja Barang	79.697.459.000,00	71.745.197.000,00
Belanja Modal	909.608.000,00	1.051.871.000,00
Jumlah Belanja	96.005.791.000,00	88.204.133.000,00

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp382.972.885,00 atau mencapai 765,95% dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp50.000.000,00. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2018		
	Anggaran	Realisasi	.%
Akun Pendapatan			
Pendapatan PNBP Lainnya	50.000.000,00	382.972.885,00	0,00
Jumlah	50.000.000,00	382.972.885,00	765,95

Realisasi Pendapatan Semester II TA 2018 mengalami kenaikan sebesar 46,90% dibandingkan TA 2017 karena terdapat pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin, pendapatan dari pemanfaatan BMN, pendapatan penyelesaian ganti kerugian Negara, penerimaan kembali belanja pegawai dan barang Tahun Anggaran yang lalu. Rincian perbandingan realisasi pendapatan pada Sekretariat Badan Karantina Pertanian adalah sebagai berikut:

Perbandingan Realisasi Pendapatan

31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Uraian	Realisasi	Realisasi	.%
	31 Desember 2018	31 Desember 2017	
Pendapatan dari Pengelolaan BMN (Pemanfaatan dan Pemindahtanganan) serta Pendapatan dari Penjualan	0,00	178.989.810,00	-100,00
Pendapatan dari penjualan, pengelolaan BMN, luran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	79.253.292,00	0,00	100,00
Pendapatan Jasa	0,00	22.800.000,00	-100,00
Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan Keuangan	7.814.784,00	0,00	100,00
Pendapatan Lain-lain	295.904.809,00	58.880.043,00	402,56
Jumlah	382.972.853,00	260.699.031,00	46,90

Realisasi Belanja pada TA 2018 adalah sebesar Rp87.804.837.126,00 atau 99,55% dari anggaran belanja sebesar Rp88.204.133.000,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2018 adalah sebagai berikut:

Rincian Pagu dan Realisasi Belanja per 31 Desember 2018

Uraian	2018		
	Anggaran	Realisasi	.%
Akun Belanja			
Belanja Pegawai	15.407.065.000,00	15.361.241.756,00	99,70
Belanja Barang	71.745.197.000,00	71.476.778.854,00	99,63
Belanja Modal	1.051.871.000,00	1.048.913.227,00	99,72
Total Belanja Kotor	88.204.133.000,00	87.886.933.837,00	99,64
Pengembalian Belanja		-82.096.711,00	0,00
Total Belanja	88.204.133.000,00	87.804.837.126,00	99,55

Realisasi Belanja Semester II TA 2018 mengalami penurunan sebesar -9,03% dibandingkan realisasi belanja pada tahun 2017. Hal ini disebabkan antara lain:

1. Penurunan Pagu Belanja Barang TA. 2018
2. Penurunan Pagu Belanja Modal TA.2018 karena sarana dan prasarana telah terpenuhi di TA.2017.

Perbandingan Realisasi Belanja 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Uraian	Realisasi	Realisasi	.%
	31 Desember 2018	31 Desember 2017	
Belanja Pegawai	15.353.293.653,00	14.933.151.001,00	2,81
Belanja Barang	71.402.630.246,00	78.434.293.015,00	-8,97
Belanja Modal	1.048.913.227,00	3.153.580.922,00	-66,74
Total Belanja	87.804.837.126,00	96.521.024.938,00	-9,03

B.2 BELANJA PEGAWAI

Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp15.353.293.653,00 dan Rp14.933.151.001,00. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Belanja Pegawai Sekretariat Badan Karantina Pertanian senilai Rp15.353.293.653,00 untuk membiayai 221 pegawai (golongan IV sebanyak 56 pegawai, golongan III sebanyak 146 pegawai dan golongan II sebanyak 19 pegawai). Realisasi belanja Semester II TA 2018 mengalami kenaikan sebesar 2,81% dari TA 2017. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Penambahan pejabat fungsional;
2. Kenaikan pangkat pegawai
3. Kenaikan gaji berkala
4. Penambahan tunjangan suami/istri dan anak

Perbandingan Belanja Pegawai
per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Uraian	Realisasi	Realisasi	Naik (Turun) %
	31 Desember 2018	31 Desember 2017	
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	15.361.241.756,00	14.847.641.501,00	3,46
Uang Lembur	0,00	86.805.000,00	-100,00
Jumlah Belanja Kotor	15.361.241.756,00	14.934.446.501,00	2,86
Pengembalian Belanja Pegawai	-7.948.103,00	-1.295.500,00	513,52
Jumlah Belanja	15.353.293.653,00	14.933.151.001,00	2,81

B.3 BELANJA BARANG

Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp71.402.630.246,00 dan Rp78.434.293.015,00. Realisasi belanja barang TA 2018 mengalami penurunan sebesar -8,97% dari TA 2017. Hal ini disebabkan penurunan pagu anggaran belanja barang di TA.2018.

Perbandingan Belanja Barang
per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Uraian	Realisasi 31 Desember 2018	Realisasi 31 Desember 2017	Naik (Turun) %
Belanja Barang Operasional	3.619.468.235,00	3.466.184.248,00	4,42
Belanja Barang Non Operasional	6.987.735.200,00	10.463.361.650,00	-33,22
Belanja Barang Persediaan	2.030.383.750,00	2.693.174.600,00	-24,61
Belanja Jasa	5.280.346.419,00	8.292.739.565,00	-36,33
Belanja Pemeliharaan	3.352.922.036,00	3.403.014.547,00	-1,47
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	47.665.459.104,00	48.509.794.633,00	-1,74
Belanja Perjalanan Luar Negeri	2.540.464.110,00	1.791.544.395,00	41,80
Jumlah Belanja Kotor	71.476.778.854,00	78.619.813.638,00	-9,09
Pengembalian Belanja Barang	-74.148.608,00	-185.520.623,00	-60,03
Jumlah Belanja	71.402.630.246,00	78.434.293.015,00	-8,97

B.4 BELANJA MODAL

Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp1.048.913.227,00 dan Rp3.153.580.922,00. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Realisasi belanja modal pada Semester II TA 2018 mengalami penurunan sebesar -66,74% dibandingkan TA 2017. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Penurunan pagu belanja modal karena sarana dan prasarana telah terpenuhi di TA. 2017. Di TA. 2017 pagu belanja modal sebesar Rp3.153.580.922,00 sedang di TA.2018 sebesar Rp1.051.871.000,00;

Perbandingan Belanja Modal
per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Uraian	Realisasi 31 Desember 2018	Realisasi 31 Desember 2017	Naik (Turun) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.048.913.227,00	3.153.580.922,00	-66,74
Jumlah Belanja Kotor	1.048.913.227,00	3.153.580.922,00	-66,74
Pengembalian Belanja Modal	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja	1.048.913.227,00	3.153.580.922,00	-66,74

B.4.1 BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp914.413.227,00 dan Rp3.153.580.922,00. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Semester II TA 2018 mengalami penurunan sebesar -66,74% dibandingkan TA 2017. Hal ini disebabkan antara lain oleh Penurunan pagu anggaran belanja modal peralatan dan mesin di TA. 2018 karena sarana dan prasarana telah terpenuhi di TA.2017.

Realisasi belanja modal peralatan dan mesin Semester II TA.2018 senilai Rp914.413.227,00 berupa pembelian aset peralatan dan mesin sebanyak 92 unit senilai Rp855.185.727,00 dan pengembangan nilai aset peralatan dan mesin senilai Rp59.227.500,00

Perbandingan Belanja Modal Peralatan dan Mesin
per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Uraian Jenis Belanja	Realisasi 31 Desember 2018	Realisasi 31 Desember 2017	Naik (Turun) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	914.413.227,00	3.153.580.922,00	-71,00
Jumlah Belanja Kotor	914.413.227,00	3.153.580.922,00	-71,00
Pengembalian Belanja	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja	914.413.227,00	3.153.580.922,00	-71,00

B.4.2 BELANJA MODAL LAINNYA

Realisasi Belanja Modal Lainnya per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp134.500.000,00 dan Rp0,00. Realisasi Belanja Modal Lainnya Semester II TA 2018 mengalami Kenaikan sebesar 100,00% dibandingkan TA 2017. Hal ini disebabkan antara lain oleh kenaikan pagu anggaran

belanja Modal Lainnya di TA. 2018 karena sarana dan prasarana berupa software belum terpenuhi di TA.2017.

Realisasi belanja Modal Lainnya Semester II TA.2018 senilai Rp134.500.000,00 berupa pembelian aset Software sebanyak unit senilai Rp77.500.000,00 dan pengembangan nilai aset Software senilai Rp57.000.000,00

Perbandingan Belanja Modal Lainnya
per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Uraian Jenis Belanja	Realisasi 31 Desember 2018	Realisasi 31 Desember 2017	Naik (Turun) %
Belanja Modal Lainnya	134.500.000,00	0,00	100,00
Jumlah Belanja Kotor	134.500.000,00	0,00	100,00
Pengembalian Belanja	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja	134.500.000,00	0,00	100,00

C PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1 ASET LANCAR

C.1.1 KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Perbandingan Kas di Bendahara Pengeluaran
per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Uraian	31 Desember 2018	31 Desember 2017
Rekening Bank Mandiri KCP Jakarta Ragunan No. Rekening 127-00-0201325-6	0.00	0.00
Uang Tunai	0.00	0.00
Jumlah	0,00	0.00

C.1.2 PERSEDIAAN

Saldo Persediaan per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp370.991.600,00 dan Rp1.172.938.650,00. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional perkantoran di Sekretariat Badan Karantina Pertanian, Persediaan tersebut berupa dokumen utama karantina, ATK dan komputer supplies sesuai dengan Berita Acara Opname Fisik Persediaan Nomor: 20817/PL.030/K.1.3.3/12/2018 tanggal 31 Desember 2018 senilai Rp370.991.600,00.

Rincian Persediaan per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2017	1.172.938.650,00
Mutasi Tambah	
Pembelian	2,030,383,750.00
Koreksi Penyesuaian Persediaan	55,233,760.00
Mutasi Kurang	
Pemakaian	(731,973,100.00)
Transfer Keluar	(1,932,008,339.00)
Barang Usang	(223,583,121.00)
Saldo per 31 Desember 2018	370.991.600,00

Mutasi transaksi penambahan dan pengurangan persediaan adalah berupa:

1. Mutasi tambah senilai Rp2,085,617,510.00 berupa pembelian senilai Rp2,030,383,750.00 (ATK dan Dokumen Karantina Pertanian) dan Koreksi Penyesuaian Persediaan Rp55,233,760.00 (koreksi penyesuaian harga);
2. Mutasi kurang senilai Rp2,887,564,560.00 berupa pemakaian untuk kegiatan operasional perkantoran senilai Rp731,973,100.00, transfer keluar dokumen karantina hewan dan tumbuhan ke 50 Satker lingkup Badan Karantina Pertanian senilai Rp1,932,008,339.00 dan barang usang senilai Rp223,583,121.00 sesuai Berita Acara Pemusnahan Nomor:16036/BA-PHP-Dok/09/2018 tanggal 25 September 2018.

Perbandingan Persediaan
per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Uraian Persediaan	31 Desember 2018	31 Desember 2017
Barang Konsumsi	370.991.600,00	1.172.938.650,00
Jumlah	370.991.600,00	1.172.938.650,00

C.2 ASET TETAP

C.2.1 TANAH

Nilai Aset Tetap berupa Tanah yang dimiliki Sekretariat Badan Karantina Pertanian per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp22.501.134.000,00 dan Rp4.789.870.000,00

Rincian Saldo Tanah per 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

No	Luas	Lokasi	Nilai
1.	782.00m ²	Pondasi, Blok M Kav No.366-367 No.6 Rt.001/017, Pulo Gadung	3.302.451.000,00
2.	4,483.00m ²	Jalan Raya Cikunir Rt.00, Jatiasih	19.198.683.000,00
Jumlah			22.501.134.000,00

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2017	4,789,870,000.00
Mutasi Tambah	
Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset	17,711,264,000.00
Mutasi Kurang	
Saldo per 31 Desember 2018	22,501,134,000.00
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2018	(0.00)
Nilai Buku per 31 Desember 2018	22,501,134,000.00

Mutasi Penambahan nilai Tanah senilai Rp17,711,264,000.00 merupakan hasil koreksi nilai oleh Tim Penertiban Aset KPKNL Jakarta II sesuai BAR Hasil Inventarisasi dan Penilaian No.BAR-IP-0079/WKN.07/KNL.02/2018 Tanggal 21 Juni 2018.

Revaluasi atas tanah dilaksanakan pada semester II tahun 2018 dengan selisih nilai revaluasi sebesar Rp17,711,264,000.00 yang terdapat pada:

No	Entitas	Selisih Nilai Revaluasi
1	Sekretariat Badan Karantina Pertanian	17,711,264,000.00

C.2.2 PERALATAN DAN MESIN

Nilai Aset Peralatan dan Mesin yang dimiliki Sekretariat Badan Karantina Pertanian per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp29.604.102.419,00 dan Rp30.026.112.819,00.

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2017	30,026,112,819.00
Mutasi Tambah	
Pembelian	855,185,727.00
Transfer Masuk	1,237,068,600.00
Reklasifikasi Masuk	453,890,600.00
Pengembangan Nilai Aset	59,227,500.00
Mutasi Kurang	
Reklasifikasi Keluar	(453,890,600.00)
Transfer Keluar	(305,936,500.00)
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	(2,265,460,743.00)
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	(2,494,984.00)
Saldo per 31 Desember 2018	29,604,102,419.00
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2018	(21,845,992,322.00)
Nilai Buku per 31 Desember 2018	7,758,110,097.00

Mutasi transaksi penambahan dan pengurangan peralatan dan mesin adalah berupa:

1. Penambahan aset peralatan dan mesin senilai Rp2,605,372,427.00 berupa:
 - a. Pembelian Peralatan dan Mesin sebanyak 92 unit senilai Rp855.185.727,00 berupa:
 - 8 (delapan) unit Televisi senilai Rp49,960,000.00
 - 2 (dua) unit Kamera Udara senilai Rp39,400,000.00
 - 15 (lima belas) unit Handphone Encription senilai Rp73,500,000.00
 - 10 (sepuluh) unit P.C senilai Rp97,000,000.00
 - 9 (sembilan) unit Laptop senilai Rp131,750,000.00
 - 22 (dua puluh dua) unit Printer senilai Rp40,855,000.00
 - 1 (satu) unit Scanner senilai Rp23,400,727.00
 - 2 (dua) buah Lemari kayu senilai Rp54,200,000.00
 - 7 (tujuh) buah Papan Gambar senilai Rp24,500,000.00
 - 8 (delapan) buah Meja Kerja Kayu senilai Rp57,040,000.00
 - 3 (tiga) buah Kursi besi/metal senilai Rp8,100,000.00
 - 2 (dua) unit Sice senilai Rp21,000,000.00
 - 1 (satu) Partisi senilai Rp199,820,000.00
 - 1 (satu) buah Lambang Instansi senilai Rp18,196,000.00

- b. Transfer Masuk senilai Rp1.237,068,600.00 dari Balai Besar Karantina Tanjung Priok senilai Rp813,653,600.00 dan Balai Karantina Pertanian Kelas II Cilegon senilai Rp423,415,000.00 dengan BAST :
- Nomor : 6562/BAST/PL.210/K.7.A/12/2018 Tanggal 26 Desember 2018, dari BBKP Tanjung Priok senilai Rp793,435,600.00 berupa:
- 1 (satu) unit Sedan senilai Rp256,970,000.00;
 - 2 (dua) unit Station Wagon senilai Rp536,465,600.00;
- Nomor : 6569/BAST/PL.210/K.7.A/12/2018 Tanggal 26 Desember 2018, dari BBKP Tanjung Priok senilai Rp20,218,000.00 berupa:
- 1 (satu) unit Note Book senilai Rp15,000,000.00;
 - 2 (dua) unit Monitor senilai Rp5,218,000.00.
- Nomor : 1713/BAST/PL.310/K.32.C/12/2018 Tanggal 26 Desember 2018, dari BKP Kelas II Cilegon senilai Rp423,415,000.00 berupa:
- 1(satu) unit Mini Bus senilai Rp423,415,000.00;
- c. Reklasifikasi masuk senilai Rp453,890,600.00 sesuai dengan Surat Keterangan Reklasifikasi No.2051/PL.220/K.1/01/2018 tanggal 22 Januari 2018 berupa:
- 15 (lima belas) unit PC senilai Rp183,750,000.00;
 - 1 (satu) unit Peralatan komputer lainnya senilai Rp4,730,000.00;
 - 65 (enam puluh lima) unit kursi besi/metal senilai Rp132,590,600.00;
 - 1 (satu) unit komputer jaringan lainnya senilai Rp56,320,000.00;
 - 2 (dua) unit Televisi senilai Rp76,500,000.00.
- d. Pengembangan Nilai Aset senilai Rp59,227,500.00 berupa perbaikan/ service besar kendaraan dinas roda 4 sebanyak 2 unit No.Polisi B 1775 RFV senilai Rp29,232,500.00 dan No. Polisi B 1531 WQ senilai Rp29,995.000.00.
2. Pengurangan aset peralatan dan mesin senilai Rp3,027,782,827.00 berupa:
- a. Reklasifikasi Keluar senilai Rp453,890,600.00 sesuai dengan Surat Keterangan Reklasifikasi No.2051/PL.220/K.1/01/2018 tanggal 22 Januari 2018 berupa:
- 15 (lima belas) unit Personal Komputer senilai Rp183,750,000.00;
 - 1 (satu) unit Stabilizer/UPS lainnya senilai Rp4,730,000.00;
 - 65 (enam puluh lima) unit kursi dorong senilai Rp132,590,600.00;
 - 1 (satu) unit Fiber Optic Oprerating lainnya senilai Rp56,320,000.00;
 - 2 (dua) unit Plasma Cutting senilai Rp76,500,000.00.
- b. Transfer Keluar senilai Rp305,936,500.00 ke 29 Satker lingkup Badan Karantina Pertanian sesuai dengan BAST sebanyak 29 BAST (terlampir) berupa:
- 1 (satu) unit kendaraan dinas roda 4(station wagon) No Polisi B 1456 EQ senilai Rp156,300,000.00; ke Balai Karantina Pertanian Kelas I Mataram;

- 16 (enam belas) unit Kamera Jam Tangan senilai Rp42,200,000.00 ke 16 Satker Lingkup Badan Karantina Pertanian;
 - 17 (tujuh belas) unit Pen Kamera senilai Rp38,037,500.00 ke 17 Satker Lingkup Badan Karantina Pertanian;
 - 10 (sepuluh) unit Handphone Encryption senilai Rp54,350,000.00 ke 10 Satker Lingkup Badan Karantina Pertanian;
 - 1 (satu) unit Lap Top senilai Rp15,049,000.00 ke Balai Besar Uji Standar Karantina Pertanian.
- c. Penghentian Aset Dari Penggunaan senilai Rp2,265,460,743.00 sesuai dengan Surat Keputusan Penghentian Penggunaan Nomor:586/Kpts/PL.320/K.1/03/2018 tanggal 29 Maret 2018 senilai Rp1,726,065,743.00 dan Surat Keputusan Penghentian Penggunaan Nomor:1232.a/Kpts/PL.320/K.1/7/2018 tanggal 2 Juli 2018 senilai Rp258,900,000.00, dan Surat Keputusan Penghentian Penggunaan Nomor:2096/Kpts/PL.320/K.1/10/2018 tanggal 2 Oktober 2018 senilai Rp280,495,000.00 berupa:
- 2 (dua) unit Sedan senilai Rp309,230,000.00
 - 1 (satu) unit Station Wagon senilai Rp50,370,000.00
 - 1 (satu) unit Mini Bus senilai Rp150,925,000.00
 - 3 (tiga) unit Sepeda Motor senilai Rp28,870,000.00
 - 1 (satu) Buah Memori Programmer senilai Rp2,210,000.00
 - 5 (lima) Buah Lemari Penyimpan senilai Rp87,500,000.00
 - 1 (satu) Buah Mesin Ketik Manual Langewagon (18-27 Inchi) senilai Rp759,000.00
 - 1 (satu) buah CCTV - Camera Control Television System senilai Rp20,584,612.00
 - 1 (satu) Buah Mesin Absensi senilai Rp18,000,000.00
 - 2 (dua) Buah LCD Projector/Infocus senilai Rp21,985,114.00
 - 1(satu) Buah Alat Perekam Suara (Voice Pen) senilai Rp2,300,000.00
 - 2 (dua) Buah Kursi Kayu senilai Rp1,870,000.00
 - 18 (delapan belas) Buah Meja Komputer senilai Rp4,242,000.00
 - 5 (lima) Buah Meja Marmer senilai Rp7,954,750.00
 - 3 (tiga) Buah Kasur/Spring Bed senilai Rp9,451,000.00
 - 4(empat) Buah Meja Makan Kayu senilai Rp6,400,000.00
 - 1(satu) Buah Pot Bunga senilai Rp11,385,000.00
 - 15 (lima belas) Buah Partisi senilai Rp496,960,260.00
 - 3 (tiga) Buah Televisi senilai Rp31,444,000.00
 - 1 (satu) Buah Unit Power Supply senilai Rp15,950,000.00
 - 2(dua) Buah Lambang Garuda Pancasila senilai Rp400,000.00
 - 2 (dua) Buah Asbak Tinggi senilai Rp2,810,000.00
 - 1 (satu) Buah DVD Player senilai Rp9,625,000.00
 - 80 (delapan puluh) Buah Lampu senilai Rp123,838,000.00
 - 4 (empat) Buah Uninterruptible Power Supply (UPS) senilai Rp6,600,000.00
 - 18 (delapan belas) Buah Chairman/Audio Conference senilai Rp38,500,000.00
 - 40 (empat puluh) Buah Camera Wall Box senilai Rp20,000,000,-
 - 1 (satu) Buah Camera Film senilai Rp8,000,000.00
 - 2 (dua) Buah Tele Recorder senilai Rp1,500,000.00
 - 6 (enam) Buah Camera Digital senilai Rp86,767,010.00

- 2 (dua) Buah Mesin Barcode senilai Rp12,027,802.00
 - 1 (dua) Buah Telephone senilai (PABX) Rp64,500,000.00
 - 7 (tujuh) Buah Facsimile senilai Rp9,078,315.00
 - 5 (lima) Buah PDA senilai Rp42,849,505.00
 - 14 (empat belas) Buah Encription senilai Rp145,650,000.00
 - 1(satu) Buah Switcher/Patch Panel senilai Rp68,000,000.00
 - 1 (satu) Buah Sound Monitor/ Sirine senilai Rp5,000,000.00
 - 1 (satu) Buah Video Anf Vedeo Editing Equipment senilai Rp29,950,000.00
 - 9 (sembilan) Buah Lap Top senilai Rp209,260,723.00
 - 3 (tiga) Buah Note Book senilai Rp61,200,000.00
 - 5 (lima) Buah Hard Disk senilai Rp2,085,000.00
 - 2 (dua) Buah Printer (Peralatan Personal Komputer) senilai Rp6,818,751.00
 - 5 (lima) Buah Scanner (Peralatan Personal Komputer) senilai Rp29,311,901.00
 - 2 (dua) Buah External/ Portable Hardisk senilai Rp3,298,000.00
- d. Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas senilai Rp2,494,984.00 berdasarkan hasil pemeriksaan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian dan bukti setor ke Negara NTPN No.4B11853CQARIHTF8 tanggal 06 Juni 2018, berupa karpet gedung E Badan Karantina Pertanian lantai 1 dan lantai 7

C.2.3 GEDUNG DAN BANGUNAN

Nilai Aset Gedung dan Bangunan yang dimiliki Sekretariat Badan Karantina Pertanian per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp1.595.945.000,00 dan Rp1.595.945.000,00.

Aset Gedung dan Bangunan tersebut Gedung Graha Quaranta di Jalan Pondasi Senilai Rp.1.470.891.000,00 dan Pagar Permanen di Jatiasih Cikunir senilai Rp.125.054.000,00.

C.2.4 JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN

Nilai Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dimiliki Sekretariat Badan Karantina Pertanian per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp90.833.719,00 dan Rp90.833.719,00 berupa jaringan

C.2.5 ASET TETAP LAINNYA

Nilai Aset Tetap Lainnya yang dimiliki Sekretariat Badan Karantina Pertanian per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp69.674.935,00 dan Rp220.278.035,00

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2017	220,278,035.00
Mutasi Kurang	
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	(150,603,100.00)
Saldo per 31 Desember 2018	69,674,935.00

Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2018	(69,674,935.00)
Nilai Buku per 31 Desember 2018	0.00

Pengurangan Aset Tetap Lainnya senilai Rp150,603,100.00 berupa:

- a. Penghentian Aset Dari Penggunaan senilai Rp150,603,100.00 sesuai dengan Surat Keputusan Penghentian Penggunaan Nomor:586/Kpts/PL.320/K.1/03/2018 tanggal 29 Maret 2018 berupa:
 - 1 (satu) buah Blue Print senilai Rp90,300,000.00;
 - 10 (sepuluh) unit Alat musik senilai Rp60,303,100.00

C.2.6 AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP

Nilai saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang dimiliki Sekretariat Badan Karantina Pertanian per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp-22.003.240.205,00 dan Rp-20.731.468.205,00.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1.	Peralatan dan Mesin	29.604.102.419,00	-21.845.992.322,00	7.758.110.097,00
2.	Gedung dan Bangunan	1.595.945.000,00	-60.322.833,00	1.535.622.167,00
3.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	90.833.719,00	-27.250.115,00	63.583.604,00
4.	Aset Tetap Lainnya	69.674.935,00	-69.674.935,00	0,00
Akumulasi Penyusutan		30.332.961.473,00	-20.638.078.631,00	9.357.315.868,00

C.3 ASET LAINNYA

C.3.1 ASET TAK BERWUJUD

Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp1.117.146.000,00 dan Rp982.646.000,00. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi secara umum tidak mempunyai wujud fisik.

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2017	982,646,000.00
Mutasi Tambah	
Pembelian	77,500,000.00
Pengembangan Nilai Aset	57,000,000.00
Mutasi Kurang	
Saldo per 31 Desember 2018	1,117,146,000.00
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2018	(414,039,980.00)
Nilai Buku per 31 Desember 2018	703,106,020.00

Mutasi transaksi penambahan dan pengurangan aset Tak Berwujud adalah berupa:

1. Penambahan aset tak berwujud senilai Rp134,500,000.00 berupa:
 - Pembelian software senilai Rp77,500,000.00 berupa aplikasi OSS (One Stop Service) BARANTAN senilai Rp42,500,000.00 dan aplikasi layanan prioritas karantina pertanian senilai Rp35,000,000.00;
 - Pengembangan nilai aset software senilai Rp57,000,000.00 berupa update Aplikasi Inhouse BARANTAN senilai Rp28,500,000.00 dan update E-CERT senilai Rp28,500,000.00.

Rincian Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Uraian	Nilai
Software	1.117.146.000,00
Jumlah	1.117.146.000,00

Aset Tak Berwujud pada Sekretariat Badan Karantina senilai Rp1.117.146.000,00 sebanyak 14 aplikasi berupa:

1. Aplikasi e_Cert (NUP 87) senilai Rp30.000.000,00;
2. Aplikasi Simponi (NUP 88) senilai Rp779.430.577,00;
3. Aplikasi TPK (NUP 89) senilai Rp39.550.000,00;
4. Aplikasi Simponi Barantan (NUP 90) senilai Rp59.450.000,00;
5. Web Monitoring (NUP 91) senilai Rp27.259.000,00;
6. Aplikasi NSW (NUP 92 dan NUP 129) senilai Rp47.900.000,00;

7. Aplikasi TPK (NUP 93) senilai Rp26.700.000,00;
8. Aplikasi Zona Tempat Pemeriksaan KT (NUP 95) senilai Rp72.950.000,00;
9. Aplikasi Utama IT Barantan (NUP 130) senilai Rp511.337.000,00;
10. Sms Center BARANTAN (NUP 131) senilai Rp479.430.577,00;
11. Aplikasi SIMRA (NUP 132) senilai Rp47.500.000,00
12. Aplikasi OSS (One Stop Service) (NUP 133) BARANTAN senilai Rp42,500,000.00
13. Aplikasi Layanan Prioritas Karantina Pertanian (NUP 134) senilai Rp35,000,000.00

C.3.2 ASET LAIN-LAIN

Nilai Aset Lain-lain yang dimiliki Sekretariat Badan Karantina Pertanian per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp280.495.000,00 dan Rp914.575.000,00. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Sekretariat Badan Karantina Pertanian serta dalam proses penghapusan dari BMN.

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2017	914,575,000.00
Mutasi Tambah	
Reklasifikasi Masuk	2,415,663,843,00
Mutasi Kurang	
Penghapusan	(91,325,000.00)
BMN yang di hentikan	(2,135,168,843.00)
Saldo per 31 Desember 2018	280,495,000.00
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2018	(258,934,285.00)
Nilai Buku per 31 Desember 2018	21,560,715.00

Mutasi transaksi penambahan dan pengurangan aset lain - lain adalah berupa:

1. Penambahan aset lain – lain senilai Rp2,415,663,843,00 berupa:
 - a. Reklasifikasi masuk aset lain – lain sebanyak 294 unit senilai Rp2,415,663,843,00 sesuai dengan Surat Keputusan Penghentian Penggunaan Nomor:586/Kpts/PL.320/K.1/03/2018 tanggal 29 Maret 2018 dan Surat Keputusan Penghentian Penggunaan Nomor:1232.a/Kpts/PL.320/K.1/7/2018 tanggal 2 Juli 2018 dan Surat Keputusan Penghentian Penggunaan Nomor:2096/Kpts/PL.320/K.1/10/2018 tanggal 2 Oktober 2018 berupa:
 - 2 (dua) unit Sedan senilai Rp309,230,000.00

- 1 (satu) unit Station Wagon senilai Rp50,370,000.00
- 1 (satu) unit Mini Bus senilai Rp150,925,000.00
- 3 (tiga) unit Sepeda Motor senilai Rp28,870,000.00
- 1 (satu) Buah Memori Programmer senilai Rp2,210,000.00
- 5 (lima) Buah Lemari Penyimpan senilai Rp87,500,000.00
- 1 (satu) Buah Mesin Ketik Manual Langewagon (18-27 Inchi) senilai Rp759,000.00
- 1 (satu) buah CCTV - Camera Control Television System senilai Rp20,584,612.00
- 1 (satu) Buah Mesin Absensi senilai Rp18,000,000.00
- 2 (dua) Buah LCD Projector/Infocus senilai Rp21,985,114.00
- 1(satu) Buah Alat Perekam Suara (Voice Pen) senilai Rp2,300,000.00
- 2 (dua) Buah Kursi Kayu senilai Rp1,870,000.00
- 18 (delapan belas) Buah Meja Komputer senilai Rp4,242,000.00
- 5 (lima) Buah Meja Marmer senilai Rp7,954,750.00
- 3 (tiga) Buah Kasur/Spring Bed senilai Rp9,451,000.00
- 4(empat) Buah Meja Makan Kayu senilai Rp6,400,000.00
- 1(satu) Buah Pot Bunga senilai Rp11,385,000.00
- 15 (lima belas) Buah Partisi senilai Rp496,960,260.00
- 3 (tiga) Buah Televisi senilai Rp31,444,000.00
- 1 (satu) Buah Unit Power Supply senilai Rp15,950,000.00
- 2 (dua) Buah Asbak Tinggi senilai Rp2,810,000.00
- 1 (satu) Buah DVD Player senilai Rp9,625,000.00
- 80 (delapan puluh) Buah Lampu senilai Rp123,838,000.00
- 4 (empat) Buah Uninterruptible Power Supply (UPS) senilai Rp6,600,000.00
- 18 (delapan belas) Buah Chairman/Audio Conference senilai Rp38,500,000.00
- 40 (empat puluh) Buah Camera Wall Box senilai Rp20,000,000,-
- 1 (satu) Buah Camera Film senilai Rp8,000,000.00
- 2 (dua) Buah Tele Recorder senilai Rp1,500,000.00
- 6 (enam) Buah Camera Digital senilai Rp86,767,010.00
- 2 (dua) Buah Mesin Barcode senilai Rp12,027,802.00
- 1 (dua) Buah Telephone senilai (PABX) Rp64,500,000.00
- 7 (tujuh) Buah Facsimile senilai Rp9,078,315.00
- 5 (lima) Buah PDA senilai Rp42,849,505.00
- 14 (empat belas) Buah Encription senilai Rp145,650,000.00
- 1(satu) Buah Switcher/Patch Panel senilai Rp68,000,000.00
- 1 (satu) Buah Sound Monitor/ Sirine senilai Rp5,000,000.00
- 1 (satu) Buah Video Anf Vedeo Editing Equipment senilai Rp29,950,000.00
- 9 (sembilan) Buah Lap Top senilai Rp209,260,723.00
- 3 (tiga) Buah Note Book senilai Rp61,200,000.00
- 5 (lima) Buah Hard Disk senilai Rp2,085,000.00
- 2 (dua) Buah Printer (Peralatan Personal Komputer) senilai Rp6,818,751.00
- 5 (lima) Buah Scanner (Peralatan Personal Komputer) senilai Rp29,311,901.00
- 2 (dua) Buah External/ Portable Hardisk senilai Rp3,298,000.00
- 1 (satu) buah Blue Print senilai Rp90,300,000.00;
- 10 (sepuluh) unit Alat musik senilai Rp60,303,100.00

2. Pengurangan aset lain – lain senilai Rp2,226,493,843.00 berupa:
- a. Penghapusan Peralatan dan Mesin sebanyak 1 unit senilai Rp(91,325,000.00) sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia No.183/Kpts/PL.320/2/2018 tanggal 26 Februari 2018 tentang Penghapusan BMN pada Badan Karantina Pertanian berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan roda 4 Station Wagon No Polisi B 7155 JQ senilai Rp91,325,000.00;
 - b. Usulan barang rusak berat ke pengelola (BMN yang di hentikan) sebanyak 289 buah senilai Rp2,135,168,843.00 sesuai dengan Surat Keputusan Penghentian Penggunaan Nomor:586/Kpts/PL.320/K.1/03/2018 tanggal 29 Maret 2018 dan Surat Keputusan Penghentian Penggunaan Nomor:1232.a/Kpts/PL.320/K.1/7/2018 tanggal 2 Juli 2018 berupa:
 - 1 (satu) unit Sedan senilai Rp245,000,000.00
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor senilai Rp13,900,000.00
 - 1 (satu) Buah Memori Programmer senilai Rp2,210,000.00
 - 5 (lima) Buah Lemari Penyimpan senilai Rp87,500,000.00
 - 1 (satu) Buah Mesin Ketik Manual Langewagon (18-27 Inchi) senilai Rp759,000.00
 - 1 (satu) buah CCTV - Camera Control Television System senilai Rp20,584,612.00
 - 1 (satu) Buah Mesin Absensi senilai Rp18,000,000.00
 - 2 (dua) Buah LCD Projector/Infocus senilai Rp21,985,114.00
 - 1(satu) Buah Alat Perekam Suara (Voice Pen) senilai Rp2,300,000.00
 - 2 (dua) Buah Kursi Kayu senilai Rp1,870,000.00
 - 18 (delapan belas) Buah Meja Komputer senilai Rp4,242,000.00
 - 5 (lima) Buah Meja Marmer senilai Rp7,954,750.00
 - 3 (tiga) Buah Kasur/Spring Bed senilai Rp9,451,000.00
 - 4(empat) Buah Meja Makan Kayu senilai Rp6,400,000.00
 - 1(satu) Buah Pot Bunga senilai Rp11,385,000.00
 - 15 (lima belas) Buah Partisi senilai Rp496,960,260.00
 - 3 (tiga) Buah Televisi senilai Rp31,444,000.00
 - 1 (satu) Buah Unit Power Supply senilai Rp15,950,000.00
 - 2 (dua) Buah Asbak Tinggi senilai Rp2,810,000.00
 - 1 (satu) Buah DVD Player senilai Rp9,625,000.00
 - 80 (delapan puluh) Buah Lampu senilai Rp123,838,000.00
 - 4 (empat) Buah Uninterruptible Power Supply (UPS) senilai Rp6,600,000.00
 - 18 (delapan belas) Buah Chairman/Audio Conference senilai Rp38,500,000.00
 - 40 (empat puluh) Buah Camera Wall Box senilai Rp20,000,000,-
 - 1 (satu) Buah Camera Film senilai Rp8,000,000.00
 - 2 (dua) Buah Tele Recorder senilai Rp1,500,000.00
 - 6 (enam) Buah Camera Digital senilai Rp86,767,010.00
 - 2 (dua) Buah Mesin Barcode senilai Rp12,027,802.00
 - 1 (dua) Buah Telephone senilai (PABX) Rp64,500,000.00
 - 7 (tujuh) Buah Facsimile senilai Rp9,078,315.00
 - 5 (lima) Buah PDA senilai Rp42,849,505.00
 - 14 (empat belas) Buah Encription senilai Rp145,650,000.00
 - 1(satu) Buah Switcher/Patch Panel senilai Rp68,000,000.00

- 1 (satu) Buah Sound Monitor/ Sirine senilai Rp5,000,000.00
- 1 (satu) Buah Video Anf Vedeo Editing Equipment senilai Rp29,950,000.00
- 9 (sembilan) Buah Lap Top senilai Rp209,260,723.00
- 3 (tiga) Buah Note Book senilai Rp61,200,000.00
- 5 (lima) Buah Hard Disk senilai Rp2,085,000.00
- 2 (dua) Buah Printer (Peralatan Personal Komputer) senilai Rp6,818,751.00
- 5 (lima) Buah Scanner (Peralatan Personal Komputer) senilai Rp29,311,901.00
- 2 (dua) Buah External/ Portable Hardisk senilai Rp3,298,000.00
- 1 (satu) buah Blue Print senilai Rp90,300,000.00;
- 10 (sepuluh) unit Alat musik senilai Rp60,303,100.00

C.3.3 AKUMULASI PENYUSUTAN ASET LAINNYA

Nilai saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya yang dimiliki Sekretariat Badan Karantina Pertanian per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp-672.974.265,00 dan Rp-1.156.264.437,00.

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya.

Berikut disajikan rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2018, sedangkan rincian akumulasi penyusutan aset lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1.	Aset Tak Berwujud	1.117.146.000,00	-414.039.980,00	703.106.020,00
2.	Aset Lain-lain	280.495.000,00	-258.934.285,00	21.560.715,00
	Akumulasi Penyusutan	1.397.641.000,00	-672.974.265,00	724.666.735,00

C.4 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

C.4.1 UANG MUKA DARI KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Uang Muka dari KPPN adalah akun pasangan dari Kas di Bendahara Pengeluaran yang ada di kelompok akun Aset Lancar

C.5 EKUITAS

C.5.1 EKUITAS

Saldo Ekuitas per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp32.954.108.203,00 dan Rp17.905.466.581,00. Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1 PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK LAINNYA

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp19.403.292,00 dan Rp22.938.822,00. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Perbandingan PNBPN Lainnya
per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Uraian	31 Desember 2018	31 Desember 2017	% Naik / Turun
Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, Informasi, Pelatihan dan Teknologi Sesuai Dengan Tugas dan Fungsi Masing-Masing Kementerian Negara/Lembaga		22.800.000,00	-100,00
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	83.292,00	138.822,00	-40,00
Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	19.320.000,00		100,00
Jumlah	19.403.292,00	22.938.822,00	-15,41

Pendapatan PNBPN Lainnya per 31 Desember 2018 mengalami penurunan sebesar 15,41 % atau senilai Rp3.535.530,00 karena penurunan Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi.

D.2 BEBAN PEGAWAI

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp15.353.293.653,00 dan Rp14.933.151.001,00. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Perbandingan Beban Pegawai
per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Uraian	31 Desember 2018	31 Desember 2017	% Naik / Turun
Beban Gaji Pokok PNS	10.971.820.070,00	10.799.493.300,00	1,59
Beban Pembulatan Gaji PNS	126.737,00	128.345,00	-1,25
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	828.106.690,00	755.090.020,00	9,66
Beban Tunj. Anak PNS	225.652.568,00	197.382.422,00	14,32
Beban Tunj. Struktural PNS	690.070.000,00	675.980.000,00	2,08
Beban Tunj. Fungsional PNS	774.834.000,00	611.605.000,00	26,68
Beban Tunj. PPh PNS	51.089.928,00	65.460.634,00	-21,95
Beban Tunj. Beras PNS	548.436.660,00	537.083.260,00	2,11
Beban Uang Makan PNS	965.422.000,00	926.093.000,00	4,24
Beban Tunjangan Umum PNS	297.735.000,00	278.030.000,00	7,08
Beban Uang Lembur	0,00	86.805.000,00	100,00
Jumlah	15.353.293.653,00	14.933.151.001,00	2,81

Beban pegawai per 31 Desember 2018 mengalami kenaikan sebesar 2,81% atau senilai Rp420.142.652,00 dibandingkan 31 Desember 2017 karena penambahan pejabat fungsional, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, penambahan tunjangan suami/istri dan anak .

D.3 BEBAN PERSEDIAAN

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp731.973.100,00 dan Rp732.574.600,00. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai. Rincian Beban Persediaan untuk 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Persediaan
per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Uraian	31 Desember 2018	31 Desember 2017	% Naik / Turun
Beban Persediaan konsumsi	731.973.100,00	732.574.600,00	-0,08
Jumlah	731.973.100,00	732.574.600,00	-0,08

Beban persediaan per 31 Desember 2018 mengalami penurunan sebesar 0,08% atau senilai Rp601,500.00 dibandingkan 31 Desember 2017 karena masih terdapat stock barang persediaan di TA.2017 yang digunakan di TA.2018.

D.4 BEBAN BARANG DAN JASA

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp15.887.549.854,00 dan Rp22.205.905.463,00. Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Uraian	31 Desember 2018	31 Desember 2017	% Naik / Turun
Beban Keperluan Perkantoran	2.708.579.235,00	2.554.638.850,00	6,02
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	209.000.000,00	194.997.000,00	7,18
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	254.289.000,00	251.968.398,00	0,92
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	447.600.000,00	464.580.000,00	-3,65
Beban Bahan	6.960.285.200,00	9.341.053.750,00	-25,48
Beban Honor Output Kegiatan	27.450.000,00	0,00	100,00
Beban Barang Non Operasional Lainnya	0,00	1.122.307.900,00	-100,00
Beban Langganan Listrik	28.883.980,00	15.938.794,00	81,21
Beban Langganan Telepon	50.732.859,00	94.553.376,00	-46,34
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	1.147.906.580,00	511.666.395,00	124,34
Beban Sewa	1.256.553.000,00	2.329.554.000,00	-46,06
Beban Jasa Profesi	2.052.840.000,00	2.857.550.000,00	-28,16
Beban Jasa Lainnya	743.430.000,00	2.467.097.000,00	-69,86
Jumlah	15.887.549.854,00	22.205.905.463,00	-28,45

Beban persediaan per 31 Desember 2018 mengalami penurunan sebesar 28,45% atau senilai Rp6,318,355,609.00 dibandingkan 31 Desember 2017 karena penurunan belanja bahan, belanja barang non operasional lainnya, belanja langganan telepon, belanja sewa, belanja jasa profesi dan belanja jasa lainnya.

D.5 BEBAN PEMELIHARAAN

Jumlah Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp3.352.922.036,00 dan Rp3.403.014.547,00. Beban pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam

kondisi normal. Rincian Beban Pemeliharaan untuk 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Pemeliharaan
per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Uraian	31 Desember 2018	31 Desember 2017	% Naik / Turun
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	429.699.960,00	580.098.820,00	-25,92
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2.804.652.076,00	2.702.915.727,00	3,76
Beban Pemeliharaan Jaringan	118.570.000,00	120.000.000,00	-1,19
Jumlah	3.352.922.036,00	3.403.014.547,00	-1,47

Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2018 mengalami penurunan sebesar -1,47% atau senilai Rp-50,092,511.00 dibandingkan 31 Desember 2017 karena penurunan alokasi pagu belanja pemeliharaan gedung bangunan dan jaringan.

D.6 BEBAN PERJALANAN DINAS

Jumlah Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp50.131.774.606,00 dan Rp50.132.198.405,00. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Perjalanan Dinas
per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Uraian	31 Desember 2018	31 Desember 2017	% Naik / Turun
Beban Perjalanan Biasa	19.520.291.255,00	19.901.751.152,00	-1,91
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	221.455.000,00	164.545.000,00	34,58
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	1.677.524.450,00	606.124.000,00	176,76
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	26.178.506.691,00	27.677.803.008,00	-5,41
Beban Perjalanan Lainnya - Luar Negeri	2.533.997.210,00	1.781.975.245,00	42,20
Jumlah	50.131.774.606,00	50.132.198.405,00	-0,00

Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2018 mengalami penurunan sebesar 0,00% atau senilai Rp423,799.00 dibandingkan 31 Desember 2017 karena penurunan belanja Perjalanan Biasa dan Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota.

D.7 BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp3.471.579.069,00 dan Rp3.743.455.421,00. Beban penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Uraian	31 Desember 2018	31 Desember 2017	% Naik / Turun
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	3.218.246.941,00	3.463.255.855,00	-7,09
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	40.215.222,00	51.219.183,00	-21,48
Beban Penyusutan Jaringan	2.270.844,00	2.270.844,00	0,00
Beban Amortisasi Software	167.350.543,00	110.100.542,00	51,99
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	0,00	70.125.000,00	-100,00
Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	43.495.519,00	45.634.497,00	-4,68
Jumlah	3.471.579.069,00	3.743.455.421,00	-7,26

Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2018 mengalami penurunan sebesar -7,26 % atau senilai Rp-271,876,352.00 dibandingkan 31 Desember 2017 karena penurunan Penyusutan Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan.

D.8 SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL

Pos Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Semester II Tahun 2018 dan 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional
per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Uraian	31 Desember 2018	31 Desember 2017	% Naik / Turun
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0,00	15.250.000,00	-100,00
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0,00	163.600.988,00	-100,00
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	59.850.000,00	0,00	100,00
Beban Kerugian Pelepasan Aset	-78.430.577,00	-300.481.214,00	-73,89
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0,00	58.880.043,00	-100,00
Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pihak Lain/Pihak Ketiga	7.814.784,00	0,00	100,00
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	18.198.092,00	0,00	100,00
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	277.706.717,00	0,00	100,00
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	58.167.960,00	85.007.000,00	-31,57
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	-2.934.200,00	-21.260.782,00	-86,19
Kerugian Persediaan Rusak/usang	-223.583.121,00	-265.618.250,00	-15,82
Jumlah	116.789.655,00	-264.622.215,00	9,96

Surplus/Defisit dari kegiatan non operasional per 31 Desember 2018 mengalami kenaikan sebesar 9,96 % atau senilai Rp381,411,870.00 dibandingkan 31 Desember 2017 karena terdapat kenaikan pada Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin , Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pihak Lain/Pihak Ketiga, Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu dan Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu.

E PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1 EKUITAS AWAL

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp17.905.466.581,00 dan Rp17.680.479.358,00.

E.2 SURPLUS/DEFISIT-LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp-88.792.899.371,00 dan Rp-95.391.982.830,00. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3 DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR

Tidak terdapat transaksi Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017.

E.4 KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS

Saldo Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp17.499.764.912,00 dan Rp-870.158.507,00.

E.4.1 KOREKSI LAIN-LAIN

Koreksi Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp-7.039.308,00. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang.

E.4.2 KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp-211.499.088,00 dan Rp0,00. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai Rincian Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi per 31 Desember 2018.

Jenis Aset Tetap	Nilai Koreksi
Reklasifikasi Masuk Peralatan dan Mesin	453.890.600,00
Koreksi Pencataan Nilai/Kuantitas Peralatan dan Mesin	-2.494.984,00
Reklasifikasi Keluar Peralatan dan Mesin	-453.890.600,00
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin Reklasifikasi Masuk	-319.031.300,00
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin Koreksi Pencataan Nilai/Kuantitas	498.996,00
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin Reklasifikasi Keluar	260.131.300,00
Jumlah	-211.499.088,00

E.4.3 PENYESUAIAN NILAI ASET

Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir

E.4.4 SELISIH REVALUASI ASET TETAP

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp17.711.264.000,00 dan Rp-863.119.199,00. Rincian Selisih Revaluasi Aset Tetap tersebut berasal dari penilaian ulang atas tanah, gedung dan bangunan serta jalan, irigasi dan jaringan berupa jalan jembatan dan bangunan air. Untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Rincian Selisih Revaluasi Aset Tetap per 31 Desember 2018.

Jenis Aset Tetap	Nilai Koreksi
Tanah	17.711.264.000,00
Jumlah	17.711.264.000,00

E.5 TRANSAKSI ANTAR ENTITAS

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp86.341.776.081,00 dan Rp96.487.128.560,00. Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN. Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

Rincian Transaksi Antar Entitas per 31 Desember 2018.

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Ditagihkan ke Entitas Lain	87.804.837.126,00
Diterima dari Entitas Lain	-382.972.885,00
Transfer Keluar	-2.056.436.760,00
Transfer Masuk	976.348.600,00
Jumlah	86.341.776.081,00

E.5.1 DITERIMA DARI ENTITAS LAIN (DDEL)/DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode sampai dengan 31 Desember 2018 saldo DDEL adalah sebesar Rp-382.972.885,00 sedangkan DKEL sebesar Rp87.804.837.126,00.

E.5.2 TRANSFER MASUK/TRANSFER KELUAR

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN. Transfer Masuk sampai dengan 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp976,348,600,00 yang terdiri dari:

Rincian Transfer Masuk per 31 Desember 2018.

No	Jenis	Entitas Asal	Nilai
1.	Peralatan dan Mesin	BBKP Tanjung Priok dan BKP Kelas II Celegon	1,237,068,600,00
2.	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	BBKP Tanjung Priok dan BKP Kelas II Celegon	-260.720.000,00
Jumlah			976.348.600,00

Sedangkan Transfer Keluar sampai dengan 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp-2.056.466.581,00 yang terdiri dari:

Rincian Transfer Keluar per 31 Desember 2018.

No	Jenis	Entitas Tujuan	Nilai
1.	Barang Konsumsi	50 Satker Karantina Pertanian	-1.932.008.339,00
2.	Peralatan dan Mesin	29 Satker Karantina Pertanian	-305.936.500,00
3.	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	29 Satker Karantina Pertanian	181.508.079,00
Jumlah			2.056.436.760,00

E.6 EKUITAS AKHIR

Saldo Ekuitas Akhir untuk periode 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp32.954.108.203,00 dan Rp17.905.466.581,00.

F PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

Struktur Organisasi Sekretariat Badan Karantina Pertanian adalah sebagai berikut :

Kepala Badan / Kuasa Pengguna Anggaran	: Ir. Banun Harpini, M Sc
Sekretaris Badan	: drh. Sujarwanto, MM
Kapus KH dan Keamanan Hayati Hewani	: drh. Agus Sunanto
Kapus KT dan Keamanan Hayati Nabati	: Dr. Ir. Antarjo Dikin, M.Sc
Kapus Kepatuhan, Kerjasama dan Informasi	: Dr. Arifin Tasrif, M.Sc
Kuasa Pengguna Anggaran	: Ir Banun Harpini, M.Sc
Pejabat Pembuat Komitmen Sekretariat	: Japar Sidik, SP, MH
Pejabat Pembuat Komitmen Pusat KH	: drh.Iswan Hariyanto, M.Si
Pejabat Pembuat Komitmen Pusat KT	: Ir. Islana Erfandiary
Pejabat Penandatanganan SPM	: R. Chandra Satria KU, SH, MM
Bendahara Pengeluaran	: Rohmani, SE
Bendahara Penerimaan	: Budhi Hari Santoso, SE

Sampai dengan 31 Desember 2018 Sekretariat Badan Karantina Pertanian telah melakukan Revisi DIPA sebanyak 7 kali dengan rincian sebagai berikut :

1. DIPA Revisi 1 Tanggal 31 Januari 2018
2. DIPA Revisi 2 Tanggal 20 April 2018
3. DIPA Revisi 3 Tanggal 24 Agustus 2018
4. DIPA Revisi 4 Tanggal 30 Oktober 2018
5. DIPA Revisi 5 Tanggal 23 November 2018
6. DIPA Revisi 6 Tanggal 30 November 2018
7. DIPA Revisi 7 Tanggal 31 Desember 2018

Sampai dengan 31 Desember 2018 Sekretariat Badan Karantina Pertanian telah menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI TA.2017 dengan rincian sebagai berikut:

1. No.12B/LHP/XVII/05/2018 Tanggal 18 Mei 2018 atas Laporan Keuangan Kementerian Pertanian TA.2017

Sampai dengan 31 Desember 2018 Sekretariat Badan Karantina Pertanian telah melaksanakan penyesuaian sisa pagu DIPA senilai Rp283.510.835,00 sesuai dengan Surat dari kepala KPPN Jakarta V Nomor:S-2598/WPB.12.KP.0505/2018 tanggal 03 September 2018 perihal Pemberitahuan atas pelaksanaan penyesuaian sisa pagu DIPA,Berita Acara Penyesuaian Sisa Pagu DIPA Nomor: BA-059/WPB.12/KP.0505/2018 tanggal 03 september 2018 senilai Rp121,555,500.00, Nomor:S-3227/WPB.12.KP.0505/2018 tanggal 29 Oktober 2018 perihal Pemberitahuan atas pelaksanaan penyesuaian sisa pagu DIPA dan Berita Acara Penyesuaian Sisa Pagu DIPA Nomor: BA-082/WPB.12/KP.0505/2018 tanggal 03 september 2018 senilai Rp161,955,335.00